

**ANALISIS TENTANG KASASI TERHADAP PUTUSAN
LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM OLEH
JAKSA PENUNTUT UMUM
(Studi Kasus Korupsi di Kejaksaan Negeri Klaten)**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

Disusun dan diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh
Nani Susilowati
NIM : E. 0004230

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2008**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

ANALISIS TENTANG KASASI TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (Studi Kasus Korupsi Di Kejaksaan Negeri Klaten)

Disusun oleh :

NANI SUSILOWATI

NIM : E. 0004230

Disetujui Untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing Skripsi

Kristiyadi, SH.,M.Hum

NIP. 131 569 273

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

ANALISIS TENTANG KASASI TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (Studi Kasus Korupsi di Kejaksaan Negeri Klaten)

Disusun oleh :

NANI SUSILOWATI

NIM : E. 0004230

Telah diterima dan di sahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 29 April 2008

TIM PENGUJI

1. Edy Herdyanto, S.H., M.H :
Ketua
2. Bambang Santoso, S.H., M.Hum :
Sekretaris
3. Kristiyadi, S.H., M.Hum :
Anggota

MENGETAHUI
Dekan,

Moh. Jamin, S.H, M.Hum
NIP. 131 570 154

ABSTRAK

NANI SUSILOWATI, 2008. ANALISIS TENTANG KASASI TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM. (Studi Kasus Korupsi di Kejaksaan Negeri Klaten). Fakultas Hukum UNS.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh jaksa penuntut umum, dengan salah satunya mengacu pada kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Klaten. Penelitian ini menjawab dasar hukum pengajuan kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh jaksa penuntut umum, dan mengenai dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasi supaya kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data sekunder. Dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang membahas tentang kasasi dan memori kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum, bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti. Jenis data sekunder yaitu data yang didapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung, melalui studi kepustakaan yang terdiri dari dokumen-dokumen, buku-buku literatur, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini yaitu dakwaan, putusan hakim Pengadilan Negeri Klaten, dan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Klaten dalam kasus korupsi di Klaten KUHAP, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi. Bahan hukum sekunder ini meliputi: buku-buku atau literatur yang berkaitan atau membahas tentang kasasi terhadap putusan bebas tidak murni, dalam hal ini putusan lepas dari segala tuntutan hukum, penelitian terdahulu yang mendukung perolehan data, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Dasar hukum kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum, belum diatur secara jelas dalam KUHAP. Meskipun demikian, dasar kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki dasar hukum yang kuat yang berupa yurisprudensi. Sedangkan, dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasi terhadap perkara yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum ditinjau dalam kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Klaten, yaitu Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan bahwa putusan bebas dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten adalah merupakan putusan bebas tidak murni, atau merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*) dan menentukan pertimbangan atau alasan pengajuan kasasi sesuai dengan Pasal 253 ayat 1.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis memperoleh kekuatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Analisis Tentang Kasasi Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum oleh Jaksa Penuntut Umum Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Klaten”.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan guna meraih gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Skripsi ini dapat selesai berkat bantuan para pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara.
3. Bapak Kristiyadi, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak ilmu khususnya hukum acara pidana.
4. Bapak Handojo Leksono, S.H, selaku Pembimbing Akademik.
5. Kepala Kejaksaan Negeri Klaten beserta staff yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Bambang Prisantoso, SH, M.Hum Jaksa Kasi Pidwas pembimbing KMM, yang memberikan inspirasi skripsi.
7. Ibu Hj.Holimah, dan Bapak H.Solichin Ibnu Hajar yang senantiasa tersenyum terhadap apapun yang Allah SWT amanahkan.
8. Kakak-kakaku tercinta dan terbanggakan, yang selalu setia menjadi bagian dari perjuangan penulis. Kak Pranoto,SH; Drs.Aminudin; Umi; Alm.Qodar; Yogo Prayitno, Umar Saputra, ST, dan adikku tersayang yang paling pengertian Susanti Puji Rahayu. Semoga kita bertemu di Surga Kelak.

9. Kakak ipar Teh Rinda, Mas Sarjo terima kasih atas motivasinya, Kayu Umi, Teh Lia, Teh Mardiah. Ponakanku yang kusayangi, Dista, Dani, Affan, Lulu, Imi, Yahya, Wawan, Yuni, Raif semoga kalian menjadi anak sholih dan sholihah.
10. Sahabat terbaikku di Justone, Akhwat-akhwat aneh Umbro, Puteri, Thina, Milda, Irma, Lina, Diana, Dila, Sarah, Nisa, Dewi Er, Bu Dewiyanto, Murfiah, dan lain-lain. Yang selalu setia berbagi peluh dalam kebaikan. Semoga tetap Istiqomah sampai kapanpun dan persahabatan kita tidak akan pernah berakhir, hingga hanya maut yang memisahkan kita.
11. Saudara-saudaraku Kusumawati Crew; Vina, Anjar, Whike, Dhini, Lia, Yani. Terima kasih atas persaudaraan yang berharga dan tak terlupakan ini.
12. Untuk generasi terpilih, Nunik, Wiwiek, Aisyah, Mita, Farin, Dian, Fitri, Asri, Cyla, Mega, Mute, Pipin, Yeni, Ade, Nia, Ririn, Beta, Rofie, Lilin, Adel, dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutka satu persatu. Lanjutkan perjuangan dan tetap semangat.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Surakarta, April 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Skripsi	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teori	13
1. Tinjauan Umum Tentang Kasasi.....	13
a. Tinjauan Umum Kasasi.....	13
b. Alasan Pengajuan Kasasi.....	14
c. Proses Pengajuan Kasasi Menurut KUHAP.....	16
2. Tinjauan Umum tentang Putusan Lepas	
dari Segala Tuntutan Hukum.....	23
a. Pengertian Putusan dan Isi Putusan.....	23
b. Macam-Macam Putusan Bebas.....	25
c. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum.....	26
3. Tinjauan Umum Tentang Jaksa Penuntut Umum.....	27
a. Pengertian Jaksa Penuntut Umum.....	27
b. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum.....	28
B. Kerangka Pemikiran	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Dasar Hukum Kasasi Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Oleh Jaksa Penuntut Umum.....	33
1. Dasar Kasasi Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum atau Bebas Tidak Murni.....	33
2. Pembahasan.....	36
B. Dasar Pertimbangan JPU Dalam Memori Kasasi Terhadap Perkara Yang Diputus Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Ditinjau Dalam Kasus Korupsi Di Kejaksaan Negeri Klaten	42
1. Posisi Kasus.....	44
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	44
3. Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klaten.....	48
4. Memori Kasasi.....	54
5. Pembahasan.....	59
a. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Atau Bebas Tidak Murni.....	59
b. Alasan Atau Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum.....	62
c. Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Memori Kasasi Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Ditinjau Dalam Kasus Korupsi Di Kejaksaan Negeri Klaten.....	71
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN.....	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Hal ini berarti bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya tanpa kecuali. Pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara dalam menegakkan hukum tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, penyelenggara negara, lembaga negara dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah.

Proses penegakkan hukum merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa. Salah satunya dilakukan dengan cara pembuatan aturan atau ketentuan dalam bentuk perundang-undangan. Peraturan perundangan yang dibuat untuk mengatur penegakkan hukum juga memerlukan elemen pendukung yang tak kalah penting yaitu aparat penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa, maupun Hakim. Dengan adanya faktor tersebut diharapkan hukum materiil yang termuat dalam aturan yang berlaku dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Salah satu hukum yang berlaku dan diatur dalam sebuah negara hukum adalah hukum pidana. Hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu, hukum pidana materiil yang merupakan keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, sanksi atas perbuatan-perbuatan tersebut, yang tercantum dalam KUHP, dan hukum pidana formil yang mengatur bagaimana negara melalui alat penegak hukum mempertahankan hukum pidana materiil, dimana hukum pidana formil ini tercantum dalam KUHP. Proses penegakkan hukum pidana diwujudkan secara konkrit melalui

pelaksanaan hukum pidana, yang prosedur pengaturannya diatur dalam hukum acara pidana.

Prosedur penegakkan hukum diakhiri dengan adanya putusan hakim. Akan tetapi, putusan hakim tidak selamanya yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan untuk menyelesaikan suatu perkara dapat memberikan rasa keadilan bagi masing-masing pihak yang berperkara. Oleh karena itu, putusan hakim pada tingkat pertama atau Pengadilan Negeri dapat dilakukan upaya hukum selanjutnya. Sehingga sesudah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahu kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya, yaitu:

- a. Hak segera menerima atau segera menolak putusan.
- b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) KUHAP).
- c. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan (Pasal 169 ayat (3) KUHAP jo. Undang-Undang Grasi).
- d. Hak untuk melakukan upaya hukum.
- e. Hak untuk mencabut pernyataan banding atau kasasi sebelum perkara diputus di Pengadilan Tinggi, dalam hal sudah dicabut perkara tidak boleh diajukan lagi.

Setelah terdakwa diberi alternatif untuk menggunakan haknya, kemudian majelis hakim juga menawarkan kepada jaksa penuntut umum alternatif,yaitu:

- a. menerima putusan hakim
- b. pikir-pikir
- c. mengajukan upaya hukum

Terhadap putusan yang dirasakan belum memenuhi rasa keadilan maka dapat diajukan upaya hukum baik oleh terdakwa maupun penuntut umum. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 12 KUHAP). Upaya hukum menurut KUHAP dibedakan menjadi dua yaitu :

a. Upaya hukum biasa

Upaya hukum biasa, dapat berupa :

1. Banding, yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk diperiksa ulang pada pengadilan yang lebih tinggi karena tidak puas atas putusan pengadilan negeri (Pasal 67 jo Pasal 233 KUHAP).
2. Kasasi, yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk meminta pembatalan putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi karena:
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Proses peradilan tidak dijalanka sesuai Undang-undang.

b. Upaya hukum luar biasa.

Upaya hukum luar biasa ada dua sebagai berikut:

1. Upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum

Kasasi demi kepentingan hukum yang mengajukan adalah Jaksa Agung.

2. Upaya hukum peninjauan kembali

Peninjauan kembali yang mengajukan adalah terpidana.

Baik kasasi demi kepentingan hukum maupun peninjauan kembali, keduanya tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan atau terdakwa atau terpidana.

Upaya hukum yang dilakukan untuk menanggapi putusan hakim Pengadilan Negeri adalah upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi. Terhadap upaya hukum biasa yang berupa upaya hukum banding, tidak dapat dikenakan terhadap semua putusan hakim.

Putusan hakim yang tidak dapat dikenakan upaya hukum banding yaitu terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 KUHAP, bahwa terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Para pihak yang tidak puas dengan putusan yang tidak dapat diajukan banding, yang belum memenuhi rasa keadilan, langsung mengajukan upaya hukum kasasi. Pengajuan upaya hukum kasasi tanpa banding merupakan inisiatif dari jaksa penuntut umum dalam hal menanggapi putusan hakim yang berupa putusan bebas. Mengingat Pasal 244 KUHAP yang menyebutkan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas. Berdasarkan Pasal 244 KUHAP tersebut, dinyatakan bahwa tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, sehingga dalam praktek peradilan, putusan bebas dapat dibedakan menjadi putusan bebas murni, dan putusan bebas tidak murni. Terhadap putusan bebas murni tidak dapat dilakukan upaya hukum banding maupun kasasi, sedangkan terhadap putusan bebas tidak murni yang bisa disamakan dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang terselubung hanya dapat dilakukan upaya hukum kasasi tanpa melalui banding terlebih dahulu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jaksa penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas tidak

murni, yang dapat disamakan sebagai putusan lepas dari segala tuntutan hukum, apabila jaksa penuntut umum belum merasakan unsur keadilan terhadap putusan yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri yang berupa putusan bebas terhadap terdakwa. Pengajuan kasasi ini tidak didahului dengan upaya hukum banding. Hal ini merupakan keunikan tersendiri dari dunia peradilan, dimana tidak dilakukan upaya hukum biasa yang berurutan dari banding sampai kasasi. Oleh karena itu, pengajuan kasasi tanpa banding terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum memerlukan dasar hukum yang kuat dan dalam memerlukan pertimbangan atau alasan dari jaksa penuntut umum dalam memori kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Dengan demikian, dasar pertimbangan jaksa penuntut umum pun pada saat mengajukan memori kasasi dapat diterima oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Tentang Kasasi Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum oleh Jaksa Penuntut Umum (Studi Kasus Korupsi di Kejaksaan Negeri Klaten) “**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar hukum kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasi terhadap perkara yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum ditinjau dalam kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Klaten ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui dasar hukum kasasi terhadap perkara pidana dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang diajukan oleh jaksa penuntut umum .
- b. Untuk mengetahui pertimbangan jaksa penuntut umum dalam memori kasasi terhadap perkara yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperoleh data yang akan penulis pergunakan dalam penyusunan skripsi sebagai syarat dalam mencapai gelar kesarjanaan.
- b. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam penelitian hukum pada khususnya di bidang Hukum Acara Pidana.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat, dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum umumnya, hukum acara pidana pada khususnya.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman mengenai permasalahan yang muncul dalam kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum.
- c. Memperkaya wacana dalam rangka mengembangkan Hukum Acara Pidana.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya. Yang diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 1986 : 7). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, dan pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai data utama.

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu

individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 1986:10). Jadi dari pengertian tersebut penulis berusaha untuk melukiskan keadaan dari suatu objek yang dijadikan permasalahan yaitu putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

1. Perpustakaan, dengan melakukan studi kepustakaan untuk memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan, antara lain :
 - a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
 - b. Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret
2. Kejaksaan Negeri Klaten, untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.

3. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, Peraturan perundang-undangan, seperti KUHAP, Peraturan kehakiman, dan peraturan perundangan lain yang terkait, yurisprudensi, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti dakwaan, tuntutan, putusan, memori kasasi, dan tulisan-tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian hukum ini mencakup :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari kaidah dasar (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006:13). Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini yaitu dakwaan, putusan hakim Pengadilan Negeri Klaten, dan memori kasasi jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Klaten dalam kasus korupsi di Klaten KUHAP, peraturan perundang-undangan UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kehakiman, UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yurisprudensi.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006:13), antara lain berupa buku-buku atau literatur yang berkaitan atau membahas tentang kasasi terhadap putusan bebas tidak murni, dalam hal ini putusan lepas dari segala tuntutan hukum, penelitian terdahulu yang mendukung perolehan data.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexi J. Moleong, 2000:183). Teknik analisis data adalah suatu uraian tentang cara-cara analisis, yaitu dengan kegiatan mengumpulkan data kemudian diadakan pengeditan terlebih dahulu, untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif.

Penganalisisan data merupakan tahap yang paling penting dalam penelitian hukum normatif. Pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis (Soerjono Soekanto, 1986:251).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data yang pada hakekatnya untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sehingga kegiatan yang dilakukan berupa pengumpulan data, kemudian data direduksi sehingga diperoleh data khusus yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas untuk kemudian dikaji dengan menggunakan norma secara materiil atau mengambil isi data disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan akhirnya diambil kesimpulan / verifikasi dan akan diperoleh kebenaran obyektif.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan.

F. Sistimatika Penulisan Hukum

Dalam bagian ini, penulis mensistematisasikan dalam bagian-bagian yang akan dibahas menjadi beberapa bab yang usahakan dapat saling kait mengait dan lebih tersistematis, terarah dan mudah dimengerti, sehingga saling mendukung dan menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh .

Adapun sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan dibahas mengenai dua hal yaitu, yang pertama adalah kerangka teori yang melandasi penelitian serta mendukung di dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini, yang meliputi: Pertama mengenai Tinjauan Umum Tentang Kasasi diantaranya yaitu, Tinjauan Umum Kasasi, Alasan Mengajukan Kasasi, Proses Pengajuan Kasasi Menurut KUHAP. Kedua, Tinjauan Umum tentang Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum diantaranya yaitu, Pengertian Putusan dan Isi Putusan, Macam-Macam Putusan Bebas, Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum. Ketiga, Tinjauan Umum Tentang Jaksa Penuntut Umum diantaranya yaitu, Pengertian Jaksa Penuntut Umum, Tugas dan Wewenang Penuntut Umum. Pembahasan yang kedua adalah mengenai kerangka pemikiran.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penjelasan dari penelitian, yang berupa Dasar Hukum Kasasi terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum, dan Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Kasasi terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum.

BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN

Bab akhir ini berisi tentang simpulan serta saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Kasasi

a. Tinjauan Umum Kasasi

Lembaga kasasi sebenarnya berasal dari Prancis. Kata asalnya ialah *casser* yang artinya memecah. Suatu putusan hakim dibatalkan demi hukum untuk mencapai kesatuan peradilan yang dilakukan oleh raja beserta dewannya yang disebut *Coseil du Roi*. Setelah revolusi yang meruntuhkan kerajaan Prancis, dibentuklah suatu badan khusus yang tugasnya menjaga kesatuan penafsiran hukum, jadi merupakan badan yang menjembatani pembuat undang-undang dengan kekuasaan kehakiman.

Pada tanggal 21 Agustus 1790 dibentuklah *le tribunal de cassation* dan pada tahun 1810 *de cassation* telah terorganisasi dengan baik. Kemudian lembaga kasasi ditiru pula oleh negeri Belanda yang pada gilirannya dibawa pula ke Indonesia. Pada dasarnya kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya (Andi Hamzah, 2002:292).

Arti kekuasaan kehakiman itu ditafsirkan secara luas dan sempit. Yang menafsirkan luas adalah D. Simon yang mengatakan "jika hakim memutus suatu perkara padahal hakim tidak berwenang menurut kekuasaan kehakiman". Dalam arti luas misalnya jika hakim pengadilan tinggi memutus padahal hakim pertama telah membebaskan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kasasi adalah pembatalan yaitu suatu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawasan tertinggi atas putusan-putusan pengadilan-pengadilan lain.

Sedangkan menurut pasal 244 KUHAP, menyatakan bahwa penuntut umum dapat mengajukan permohonan kasasi terhadap perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Tujuan melakukan kasasi, ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum (Andi Hamzah, 2002:292).

Melalui kasasi Mahkamah Agung dapat menggariskan, memimpin dan *uitbouwen* dan *voorbouwen* (mengembangkan dan mengembangkan lebih lanjut) hukum melalui yurisprudensi. Dengan demikian ia dapat mengadakan adaptasi hukum sesuai dengan derap dan perkembangan dari masyarakat dan khususnya keadaan sekelilingnya apabila perundang-undangan itu sendiri kurang gerak sentuhnya dengan gerak dinamika kehidupan masyarakat itu sendiri (Oemar Seno Adji, 1985:43).

b. Alasan Pengajuan Kasasi

Alasan mengajukan kasasi oleh pihak terdakwa atau Penuntut Umum, juga dituangkan dalam suatu perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 253 (1), yaitu untuk menentukan :

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Berdasarkan alasan dalam KUHAP Pasal 253 (1) maka putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dibatalkan karena:

- 1) Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung Mengadili perkara tersebut.
- 2) Cara megadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
- 3) Pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain untuk mengadili perkara tersebut(Moch. Faisal Salam, 2001:361).

Alasan pengajuan kasasi dalam Pasal 18 UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung :

1. Apabila peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaanya.
2. Apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan yang harus diturut undang-undang menurut undang-undang.

c. Proses Pengajuan Kasasi Menurut KUHAP

Proses pengajuan kasasi menurut KUHAP terdapat dalam Pasal 245 KUHAP sampai Pasal 257 KUHAP.

Pasal 245 disebutkan bahwa :

1. Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.
2. Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta permohonan, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.
3. Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Pasal 246 disebutkan bahwa :

1. Apabila tenggang waktu yang dimaksud dalam Pasal 245 ayat 1 telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.
2. Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk itu gugur.
3. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau ayat 2 maka panitera membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

Pasal 247 disebutkan bahwa :

1. Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi.
2. Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan.
3. Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya.
4. Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali.

Pasal 248 disebutkan bahwa :

1. Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkan kepada panitera yang untuk itu, ia memberikan surat tanda terima.
2. Dalam hal pemohon kasasi, adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera mambuatkan memori kasasinya.
3. Alasan yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) undang-undang ini.

4. Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.
5. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 246 ayat (3) berlaku juga untuk ayat (4) pasal ini.
6. Tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi.
7. Dalam tenggang waktu sebagaimana tersebut ayat (1), panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi.

Pasal 249 disebutkan bahwa :

1. Dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi, kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan itu dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1).
2. Tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas diserahkan kepada panitera pengadilan
3. Selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari setelah tenggang waktu tersebut dalam ayat (1), permohonan kasasi tersebut selengkapnya oleh panitera pengadilan segera disampaikan kepada Mahkamah Agung.

Pasal 250 disebutkan bahwa :

1. Setelah panitera pengadilan negeri menerima memori dan atau kontra memori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1a) dan ayat (4), ia wajib segera mengirim berkas perkara kepada Mahkamah Agung.

2. Setelah panitera Mahkamah Agung menerima berkas perkara tersebut ia seketika mencatatnya dalam buku agenda surat, buku register perkara dan kartu penunjuk.
3. Buku register perkara tersebut pada ayat (2) wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga karena jabatannya oleh Mahkamah Agung.
4. Dalam hal ketua Mahkamah Agung berhalangan, maka penandatanganan dilakukan oleh wakil ketua Mahkamah Agung dan jika keduanya berhalangan maka dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung ditunjuk hakim anggota yang tertua dalam jabatan.
5. Selanjutnya panitera Mahkamah Agung mengeluarkan surat bukti penerimaan yang aslinya dikirimkan kepada panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan, sedangkan kepada para pihak dikirimkan tembusannya.

Pasal 251 disebutkan bahwa :

1. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi.
2. Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) berlaku juga antara hakim dan atau panitera tingkat kasasi dengan hakim dan atau panitera tingkat banding serta tingkat pertama, yang telah mengadili perkara yang sama.
3. Jika seorang hakim yang mengadili perkara dalam tingkat pertama atau tingkat banding, kemudian telah menjadi hakim atau panitera pada Mahkamah Agung, mereka dilarang bertindak sebagai hakim atau panitera untuk perkara yang sama dalam tingkat kasasi.

Pasal 252 disebutkan bahwa :

1. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 220 ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi.
2. Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka dalam tingkat kasasi :
 - a. Ketua Mahkamah Agung karena jabatannya bertindak sebagai pejabat yang berwenang menetapkan.
 - b. Dalam hal menyangkut Ketua Mahkamah Agung sendiri, yang berwenang menetapkan adalah suatu panitia yang terdiri dari tiga orang yang dipilih oleh dan antar hakim anggota yang seorang diantaranya harus hakim anggota yang tertua dalam jabatan.

Pasal 253 disebutkan bahwa :

1. Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :
 - a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
 - b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang
 - c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
2. Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik dari berita acara pemeriksaan di sidang, semua

surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.

3. Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka dengan cara pemanggilan yang sama.
4. Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukannya permohonan kasasi.
5. a. Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.
b. Dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari, sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.

Pasal 254 disebutkan bahwa :

Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247, mengenai hukumannya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.

Pasal 255 disebutkan bahwa :

1. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
2. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
3. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Pasal 256 disebutkan bahwa :

Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255.

Pasal 257 disebutkan bahwa :

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 226 dan Pasal 243 berlaku juga bagi putusan kasasi Mahkamah Agung, kecuali tenggang waktu tentang pengiriman salinan putusan beserta berkas perkaranya kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama dalam waktu tujuh hari.

2. Tinjauan Umum tentang Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum.

a. Pengertian Putusan dan Isi Putusan

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP yaitu bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam Pasal 182 ayat 6 KUHAP, bahwa putusan sedapat mungkin merupakan hasil musyawarah majelis dengan permufakatan yang bulat, kecuali hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak tercapai, maka ditempuh dengan dua cara :

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak.
- b. Jika yang tersebut pada huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan, yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Menurut Yahya Harahap bahwa putusan akan dijatuhkan pengadilan, tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (Yahya Harahap, 2002:347).

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan :

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana

Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu ” Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Rumusan Van Bemellen yaitu ” putusan pembedaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana” (Andi Hamzah, 2002:281).

2. Putusan pelepasan dari segala tuntutan

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan menurut Pasal 191 ayat (2) KUHAP yaitu ” Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan”. Sehingga putusan pelepasan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti.
- b. Perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana maka terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.

3. Putusan Bebas

Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum (*Vrijspraak*). Bebas dari segala tuntutan hukum sehingga terdakwa bebas dari pembedaan. Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yaitu ” Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Van Bemellen berpendapat, bahwa putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau

setidak-tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya (Andi Hamzah, 2002:282).

b. Macam-macam Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Dalam praktek peradilan, putusan bebas dibagi menjadi :

a. Putusan bebas Murni (*de “zuivere vrijspraak”*)

Putusan bebas murni adalah putusan akhir dimana hakim mempunyai keyakinan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah tidak terbukti (Rd. Achmad S. Soemadipradja. 1981:89).

Pandangan Mahkamah Agung, bahwa hanya pembebasan murnilah yang tidak dapat diajukan dalam pemeriksaan kasasi (Oemar Seno Adjie, 1985:163).

b. Putusan Bebas Tidak Murni (*niet zuivere vrijspraak*)

Oleh Prof. Van Bemellen pernah diajukan beberapa putusan bebas tidak murni, yang mestinya bersifat lepas dari segala tuntutan hukum. Pembebasan tidak murni pada hakikatnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang terselubung, dapat dikatakan apabila dalam suatu dakwaan unsur delik dirumuskan dengan istilah yang sama dalam perundang-undangan, sedangkan hakim memandang dakwaan tersebut tidak terbukti (Oemar Seno Adjie, 1985:167).

Yurisprudensi konstan dari Mahkamah Agung menyatakan bahwa tidak bisa diajukan upaya hukum terhadap putusan bebas, dan masih membuka untuk pemeriksaan dalam tingkat kasasi terhadap putusan bebas tidak murni. Maka yurisprudensi ini dijadikan dasar bagi

Mahkamah Agung untuk mengadakan pemeriksaan terhadap putusan bebas tidak murni.

Putusan bebas tidak murni mempunyai kualifikasi, sebagai berikut :

- 1) Pembebasan didasarkan atas suatu penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan.
 - 2) Dalam menjatuhkan putusan pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, baik absolut maupun relatif dan sebagainya (Oemar Seno Adjie, 1985:164).
- c. Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan kegunaannya (*de "vrijskpraak op grond van doelmatigheid"*), pembebasan yang didasarkan atas pertimbangan bahwa harus diakhiri suatu penuntutan yang sudah pasti tidak akan ada hasilnya (Rd. Achmad S. Soemadipradja, 1981:89).
- d. Pembebasan yang terselubung (*de "bedekte vrijskpraak "*), pembebasan yang dilakukan dimana hakim telah mengambil keputusan tentang "*feiten*" dan menjatuhkan putusan "pelepasan dari tuntutan hukum", padahal putusan tersebut berisikan suatu" pembebasan secara murni"(Rd. Achmad S. Soemadipradja, 1981:89).

c. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum(*onstlag van rechtvervolging*), yang dinamai juga putusan lepas dari segala tuntutan hukum terselubung (Andi Hamzah, 2002:289). Dimana putusan tersebut masuk ke dalam putusan bebas tidak murni.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah suatu pembebasan. Pengadilan berpendapat, bahwa hasil pemeriksaan

di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 KUHAP).

Bebas tidak murni pada hakikatnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terselubung. Lepas dari segala tuntutan hukum bisa dikatakan ada, apabila dalam suatu dakwaan unsur dari delik dirumuskan dengan istilah yang sama dalam perundang-undangan, sedangkan hakim menafsirkan dan memandang dakwaan tersebut tidak terbukti secara kurang tepat (Oemar Seno Adji, 1985:167).

Tertutup kemungkinan untuk mengajukan banding terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tetapi dapat diajukan kasasi (Andi Hamzah , 2002:292).

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Keadaan sebaliknya juga dimungkinkan yakni apabila dalam mengadili fakta-fakta membebaskan tuduhan-tuduhan dimana sebenarnya terdapat pembebasan yang terselubung (*bedekte vrijpraak*) (Hulsam, 1984:171).

3. Tinjauan Umum Tentang Jaksa Penuntut Umum

a. Pengertian Jaksa Penuntut Umum

KUHAP memberikan uraian pengertian Jaksa dan Penuntut Umum pada Pasal 1 butir 6a dan b serta Pasal 13. Ditegaskan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta

melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6a KUHAP).

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 butir 6a jo. Pasal 13 KUHAP).

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang dimaksud jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan penuntut Umum menurut Pasal 1 angka 2 adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

b. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum

Tugas dan wewenang kejaksaan, secara umum mempunyai tugas dalam bidang pidana, dalam Pasal 30 ayat 1 UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu:

1. Melakukan penuntutan.
2. Melaksanakan penetapan hakim dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Melakukan pengawasan, terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Keppres RI No. 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dalam Bab 1 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, disebutkan dalam Pasal 1 sampai Pasal 3 yaitu :

Pasal 1 :

1. Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama dibidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
2. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri sebagai pelaksana kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan.

Pasal 2 :

Kejaksaan mempunyai tugas melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan serta turut menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.

Pasal 3:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kejaksaan menyelenggarakan fungsi:

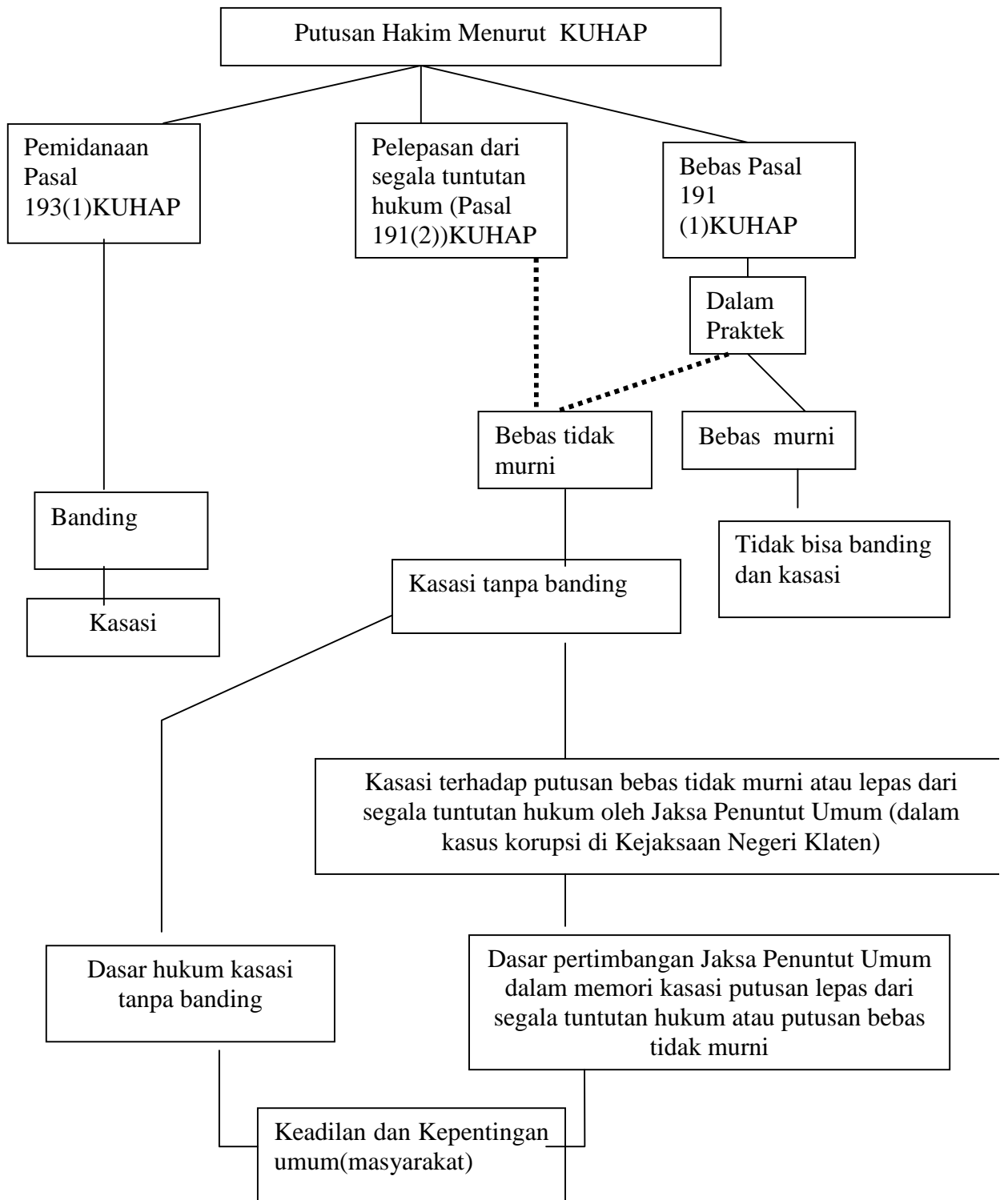
- a. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan

peraturan perundang-undangan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden.

- b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi, dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Pelaksanaan penegakkan hukum baik preventif maupun represif, yang berintikan keadilan dibidang pidana, melakukan dan / atau turut menyelenggarakan intelegen yustisial di bidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan, dan penegakkan hukum di bidang perdata, dan tata usaha negara, serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah, dan menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden.
- d. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim, karena tidak mampu berdiri sendiri, atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.
- e. Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah di pusat dan di daerah dan turut menyusun peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

- f. Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang diterapkan oleh Presiden.

2. Kerangka Pemikiran



Gambar 1: Kerangka Berfikir

Putusan Hakim Menurut KUHAP, Yaitu berupa Pemidanaan Pasal 193(1) KUHAP, Pelepasan dari segala tuntutan hukum Pasal 191(2) KUHAP, Bebas Pasal 191 (1) KUHAP. Terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri yang berupa pemidanaan bisa dilakukan upaya hukum biasa secara berurutan dari mulai banding kemudian dilanjutkan kasasi. Sedangkan terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan bebas tidak dapat dilakukan upaya hukum banding. Apabila dalam putusan hakim Pengadilan Negeri belum memenuhi rasa keadilan dan merugikan kepentingan umum atau masyarakat, maka atas inisiatif jaksa penuntut umum dapat dilakukan upaya hukum kasasi tanpa banding. Upaya hukum kasasi tanpa banding ini diperbolehkan terhadap putusan bebas yang berupa putusan bebas tidak murni atau dapat disamakan dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Sedangkan terhadap putusan bebas murni tidak dapat dilakukan upaya hukum banding dan kasasi.

Kasasi tanpa banding adalah sesuatu yang belum diatur dengan jelas dalam KUHAP sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan dasar hukum yang kuat diluar KUHAP dan pertimbangan dari jaksa penuntut umum dalam memori kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau bebas tidak murni. Apabila telah memiliki dasar hukum yang kuat tentang kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan dan dasar pertimbangan dalam memori kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum dapat diterima oleh Mahkamah Agung. Tujuan akhir dari kasasi tersebut adalah untuk mencapai keadilan dalam penegakkan hukum dan untuk memenuhi kepentingan umum(masyarakat).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Kasasi Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum oleh Jaksa Penuntut Umum

1. Dasar Hukum Kasasi Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum atau Putusan Bebas Tidak Murni

Dasar hukum kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yang dapat disamakan dengan putusan bebas tidak murni, yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum adalah sebagai berikut :

- a. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.14-PW.07.03.Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 (Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP) butir 19 menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi, hal ini akan didasarkan pada Yurisprudensi.
- b. Yurisprudensi tentang kasasi terhadap putusan bebas :
 - 1) Putusan MA Reg. No. 275/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan PN itu, Jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke MA.
 - 2) Putusan MA Reg. No. 892K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1984, menyatakan bahwa MA wajib memeriksa apabila pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu.
 - 3) Putusan MA Reg.No. 532 K/Pid/1984 tanggal 10 Januari 1985, menyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat dibanding, tetapi dapat langsung dimohonkan kasasi.

- 4) Putusan MA Reg. 449K/Pid/1984 tanggal 2 September 1988, menyatakan bahwa MA atas dasar pendapatnya sendiri bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, harus menerima permohonan kasasi tersebut.
- 5) Putusan MA Reg. No.449K/Pid/1984 tanggal 8 Mei 1985 menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan PN itu, jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke MA.
- 6) Putusan MA Nomor 321 K/Pid/1983, yang isinya adalah :
 - a). Menimbang bahwa namun demikian sesuai Yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi tidak dapat diterima.
 - b). Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu berdasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaannya dan bukan di dasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu, Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi) Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut.
- 7) Putusan MARI Nomor 759 K/ Pid/1984, tanggal 8 Mei 1985
 - a). Permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, karena permohonan kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut merupakan pembebasan yang tidak murni.

8) Putusan MARI Nomor : 1454 K/Pid/1985, tanggal 19 Maret 1987 :

Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diterapkan secara tepat dan adil, wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahan yang membebaskan terdakwa guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahan itu.

Namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada. Apabila putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah malampaui batas wewenangnya, Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan pembebasan yang murni, harus menerima permohonan kasasi tersebut.

- c. Hasil rumusan penataran terpadu aparat penegak hukum tanggal, 11-16 April 1988 di Pusdiklat Departemen Kehakiman RI Sebagaimana disempurnakan dalam Rapat MAHKEJAPOL tanggal 10 Pebruari 1992 dan pada tanggal 4 Maret 1992, dalam bagian penyidikan, putusan pengadilan dan upaya hukum, *point* ke-43 yaitu tentang upaya hukum terhadap putusan yang sebagian membebaskan atau melepaskan dari segala tuntutan hukum. Misalnya dalam pemecahan

kasus ini adalah, jika terdapat dakwaan penuntut umum yang dikonstruksikan secara kumulatif atau alternatif oleh hakim diputus bahwa dakwaan kesatu dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan hukum, sedangkan untuk dakwaan lain dinyatakan bersalah. Pemecahan masalah ini adalah bahwa penuntut umum diperkenankan sekaligus mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan atas dakwaan kesatu tersebut di samping banding terhadap putusan atas dakwaan kedua dan seterusnya, sedangkan berkasnya oleh Pengadilan Negeri dikirim Pengadilan Tinggi terlebih dahulu untuk memperoleh putusan di tingkat bandingnya, berkasnya dikirim ke Mahkamah Agung untuk memperoleh putusan kasasi.

2. Pembahasan

Berdasarkan uraian di atas dinyatakan dengan jelas bahwa terhadap putusan bebas, terutama dalam putusan bebas tidak murni atau disamakan dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tidak dapat diajukan banding tetapi dapat diajukan kasasi. Setelah dikeluarkan putusan Pengadilan Negeri yang berupa putusan bebas, yang dianggap sebagai putusan bebas tidak murni atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka langsung dilakukan pengajuan kasasi tanpa melalui banding terlebih dahulu.

Tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, berdasarkan Pasal 67 KUHAP, yaitu mengandung pengertian bahwa terhadap putusan pembebasan, putusan pengadilan acara cepat, kepada terdakwa atau penuntut umum tidak dapat mengajukan banding.

Demikian juga dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, atas putusan pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan putusan lepas dari tuduhan, dapat dimintakan banding oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali apabila ada undang-undang yang menentukan lain. Berdasarkan pasal tersebut di atas, terlihat jelas bahwa terhadap putusan

bebas, dalam hal ini termasuk bebas tidak murni tidak dapat dilakukan banding. Hal ini terkait juga dengan Pasal 233 ayat 1 KUHAP yaitu Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu pada penuntut umum. Hal ini mengenai putusan yang dapat atau tidak dapat diajukan banding. Termasuk dalam hal ini yang tidak dapat diajukan banding adalah putusan bebas disebutkan bebas murni ataupun tidak murni.

Akan tetapi, dalam prakteknya jaksa yang tidak puas dengan adanya putusan bebas langsung mengajukan kasasi. Hal ini sesuai dengan dasar hukum pengajuan kasasi tersebut di atas. Demi keadilan, demi penegakkan hukum, dilakukanlah kasasi terhadap putusan bebas tidak murni atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Peranan jaksa penuntut umum dalam pengajuan kasasi kepada Mahkamah Agung, yaitu dengan dasar hukum dalam Pasal 244 KUHAP, yaitu ” Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Peranan penuntut umum dalam pengajuan kasasi adalah sebagai pihak yang diberi hak untuk mengajukan kasasi terhadap putusan hakim pada Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) yang belum memenuhi asas keadilan, yang bersifat membebaskan terdakwa, dan bukan merupakan pembebasan murni. Dalam mengajukan kasasi terhadap putusan bebas tidak murni yang bisa disamakan dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum upaya hukum kasasi dilakukan berdasarkan inisiatif jaksa.

Beberapa jalan dapat ditempuh oleh jaksa dalam menghadapi putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim, dengan menyatakan bahwa putusan bebas adalah putusan bebas tidak murni sifatnya, baik jaksa memandang bahwa interpretasi dari tuduhan yang telah ditinggalkan oleh hakim dalam

mengeluarkan putusan bebas tersebut, maupun dijatuhkan putusan bebas yang semestinya merupakan suatu putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Keduanya harus diajukan oleh jaksa apabila ia akan menilai putusan bebas yang tidak murni tersebut (Oemar Seno Adjie, 1985:22).

Permohonan kasasi dapat diajukan oleh pihak yang termasuk apa yang dikatakan oleh Van Bemmelen sebagai dramatis *personnae*, ialah terdakwa ataupun jaksa dalam putusan bebas tidak murni atau lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechvervolging*), mengenai ketentuan hukum pidana materiil yang salah diterapkan, dan hukum pidana formil yang salah dilakukan.

Inisiatif jaksa terhadap pengajuan kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum merupakan *follow up* dari putusan hakim pada Pengadilan Negeri atas pemanfaatan hak dari jaksa penuntut umum. Hak dari Jaksa Penuntut Umum yang merupakan salah satu bagian dari aturan kejaksaan yaitu :

1. Apabila putusan hakim memenuhi setengah dari tuntutan jaksa maka jaksa berhak untuk mengajukan upaya hukum lanjutan atau berhak untuk menerima putusan hakim tersebut. Jadi minimal putusan hakim harus memenuhi setengah dari tuntutan jaksa penuntut umum.
2. Apabila putusan hakim memenuhi setengah lebih maka jaksa penuntut umum menerima putusan hakim tersebut.
3. Apabila putusan hakim kurang dari setengah dari tuntutan jaksa penuntut umum maka jaksa penuntut umum wajib melakukan upaya hukum lanjutan atas putusan hakim tersebut.

Pengajuan kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum, merupakan upaya untuk mencegah adanya kesewenang-wenangan dari pengadilan tingkat pertama. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Mr. Tirtaamidjaja tentang ” Kemungkinan kekhilafan hakim tingkat pertama” dapat terjadi meskipun telah berupaya maksimal untuk cermat dan teliti,

tetapi hakikatnya manusia tidak luput dari kekhilafan. Hal ini sebagaimana dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.14-PW.07.03.Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 (Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP) butir 19 menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi, hal ini akan didasarkan pada Yurisprudensi.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat dilakukan banding, tetapi tunduk pada acara kasasi. Hal ini karena, putusan lepas dari segala tuntutan hukum apapun alasannya belum merupakan terbukti atau tidaknya perbuatan pidana atau bukan atau apakah perbuatan dikuasai oleh suatu ketentuan undang-undang atau tidak. Jadi merupakan masalah konstruksi hukum, yang berarti masalah hukum. Tunduk pada acara kasasi karena MA selaku lembaga hukum tertinggi wajib membetulkannya bila terjadi kesalahan mengenai hukumnya. Termasuk di dalamnya putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan bebas tidak dapat dijadikan dasar dalam pengajuan kasasi. Hal ini menumbuhkan usaha jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa putusan tersebut merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtvervolging*).

Berdasarkan Pasal 67 KUHAP, jaksa mendapat hambatan dalam pengajuan kasasi yaitu, bila Hakim Pengadilan Negeri mengeluarkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan yang dipandang oleh Pengadilan tinggi semestinya merupakan putusan bebas murni yang tidak dapat diajukan banding maupun kasasi.

Dalam tingkat kasasi, alasan jaksa menyatakan bahwa putusan tersebut merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum harus disertai pertimbangan yang tepat. Hal ini karena alasan yang tidak tepat dapat

membuat permohonan kasasi ditolak berdasarkan putusan Mahkamah Agung 17 Juli 1974 No. 69 K/Kr/1973.

Kesulitan jaksa lainnya dalam pengajuan kasasi adalah apabila berdasarkan pertimbangan hakim dengan melalui pemeriksaan dinyatakan bahwa terdakwa atau perbuatan yang didakwakan tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan sebagaimana dalam Pasal 191 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, maka Jaksa Penuntut Umum sulit untuk menerima atau membatalkan putusan Hakim Pengadilan Negeri tersebut.

Kasasi tanpa banding sebagaimana tersebut di atas, memang tidak disebutkan secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang merupakan peraturan yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan hukum acara pidana. Akan tetapi, kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum tersebut mengacu pada dasar hukum yang berupa keputusan menteri kehakiman, dan sebagian besar dengan dasar hukum yang berupa yurisprudensi. Dimana yurisprudensi menurut Kansil adalah merupakan putusan hakim pengadilan yang memuat peraturan sendiri, kemudian diikuti dan dijadikan dasar putusan oleh hakim lain dalam perkara yang sama (Riduan Syahrani, 2004:118). Hal ini karena perundang-undangan yang ada tidak *up to date* dan tidak memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan menjadi tugas hakim untuk mengadakan inovasi legislatif untuk mengadaptasi dengan pandangan masyarakat. Sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara, hakim menyadari bahwa yang diputuskan tidak selamanya mengandung rasa keadilan, dan ini yang menjadi dasar dalam kasasi terhadap putusan hakim terutama putusan lepas dari segala tuntutan hukum, karena kasasi ini merupakan salah satu bentuk koreksi terhadap putusan hakim dalam tingkat pertama atau Pengadilan Negeri.

Pengaturan mengenai kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagian besar diatur dalam Yurisprudensi. Apabila dikaitkan dengan sinkronisasi horisontal, yaitu dihadapkan dengan peraturan

perundang-undangan, adalah masih sinkron. Meskipun, dalam KUHAP yang mengatur ketentuan beracara di peradilan umum belum diatur secara jelas, tapi aturan atau ketentuan yang ada dalam Yurisprudensi. Hal ini karena, Yurisprudensi merupakan pedoman atau *preseden* dan sumber hukum yang hidup di dalam praktek hukum sehari-hari.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dinyatakan bahwa perkembangan dari perundangan sebagai sumber utama dalam penerapan hukum, dalam *law applicationnya*, perlu disertai dengan perkembangan Ilmu Hukum dan Yurisprudensi yang diakui pula sebagai sumber hukum. Terdapatlah kaitan yang harmonis, atau terdapat kesikronan antara perundang-undangan secara hukum teoritis, Ilmu hukum dan secara praktis yang mengembangkan Ilmu Hukum melalui Yurisprudensi dengan mengadakan penemuan hukum.

Selain Yurisprudensi yang menjadi dasar hukum dalam kasasi tanpa banding, adalah Keputusan Menteri Kehakiman dan Hasil rumusan penataran terpadu aparat penegak hukum tanggal ,11-16 April 1988 di Pusdiklat Departemen Kehakiman RI sebagaimana disempurnakan dalam rapat MAHKEJAPOL tanggal 10 Pebruari 1992 dan pada tanggal 4 Maret 1992. Kedua ketentuan tersebut boleh diterapkan asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan di atasnya yaitu Undang-Undang Dasar, KUHAP, dan peraturan lain di atasnya yang mengatur tentang kasasi.

B. Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Kasasi Terhadap Perkara yang Diputus Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Ditinjau dalam Kasus Korupsi di Kejaksaan Negeri Klaten

Pada hakikatnya putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*) adalah merupakan putusan bebas. Oleh karena itu, berdasarkan inisiatif jaksa, putusan bebas yang dalam praktek lebih diperluas dengan sebutan bebas tidak murni, atau dalam hal ini adalah lepas dari segala tuntutan hukum memerlukan adanya pertimbangan atau alasan yang tepat, agar jaksa dapat membuktikan bahwa putusan lepas dari segala tuntutan

hukum tersebut merupakan putusan bebas tidak murni. Pertimbangan atau alasan jaksa penuntut umum tertuang dalam memori kasasi yang dibuat oleh jaksa penuntut umum.

Mahkamah Agung tahun 1974 menggariskan Yurisprudensi mengenai yang dimintakan kasasi dengan menyatakan antara lain, bahwa permohonan kasasi terhadap putusan pembebasan dari segala tuduhan tidak dapat diterima, karena dalam memori kasasi tidak memuat bantahan, bahwa pembebasan tersebut sesungguhnya suatu pelepasan dari segala tuntutan hukum berdasarkan alasan bahwa pembebasan adalah tidak murni, juga tidak terdapat keberatan-keberatan bahwa pembebasan termaksud didasarkan atas tafsiran yang kurang benar atau kurang tepat (Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Juli 1974 No. 69K/ Kr/1973).

Putusan Pengadilan Negeri yang berupa putusan bebas yang dibatalkan, selalu didasarkan atas dakwaan. Dalam kasus ini didasarkan atas dakwaan primair dan dakwaan subsidiar. Berdasarkan dakwaan tersebut, apakah peraturan hukum sudah dilaksanakan atau tidak atau ada kesalahan atau tidak dalam melaksanakannya atau menerapkannya.

Apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan pembebasan yang murni, harus menerima permohonan kasasi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam memori kasasi Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Apabila peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaannya.
2. Apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan yang harus diturut undang-undang menurut undang-undang.

Dalam penulisan hukum ini, penulis melakukan penelitian mengenai dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam memori kasasi, kasus korupsi di Klaten, yang diputus bebas, dengan cara menganalisis memori kasasi yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dan diajukan kepada Mahkamah Agung. Apakah dalam memori kasasi tersebut sudah menerapkan alasan pengajuan atau pertimbangan dalam mengajukan kasasi terhadap putusan bebas tidak murni atau lepas dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan data yang diperoleh maka dalam bab ini penulis akan menganalisis terhadap memori kasasi dalam kasus korupsi yang diajukan jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Klaten dengan terdakwa Drs. Bambang Purwanto, MM.

1. Posisi Kasus

Pada tanggal 28 Mei 2002 hingga bulan Desember 2002 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002 terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Drs. Bambang Purwanto, MM jabatan atau kedudukannya sebagai penanggung jawab proyek perintisan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Tahun Anggaran (TA) 2002, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor: 413 tahun 2002 tanggal 1 April 2002, bertempat tinggal di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten di Desa Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten. Terdakwa berdasarkan kewenangannya atau jabatannya secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp. 49.000.000,-(empat puluh sembilan juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Primair :

Bahwa terdakwa Drs.BAMBANG PURWANTO,MM pada tanggal 28 Mei 2002 hingga bulan Desember 2002 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002 dalam jabatan atau kedudukannya sebagai penanggung jawab proyek perintisan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Tahun Anggaran (TA) 2002, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor: 413 tahun 2002 tanggal 1 April 2002, bertempat tinggal di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten di Desa Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp. 49.000.000,-(empat puluh sembilan juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 28 Maret 2002 sesuai dengan Keputusan Bupati Klaten Nomor 903/331/2002 tentang Penjabaran Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten, Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Klaten mendapat Proyek Perintisan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) dengan Pelaksanaan: Perintisan Pembangunan Gedung BLK sejumlah Rp. 68.500.000,- dan Administrasi Proyek Rp. 1.500.000,- jumlah Rp. 70.000.000,- Tujuan Proyek tersebut adalah meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan pelatihan kerja. Sasarannya adalah terbangunnya gedung BLK serta prasarana pendukung, Lokasi: Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 413 Tahun 2002, tentang Penunjukan Penanggungjawab Proyek, Wakil Penanggungjawab Proyek, Pimpinan Proyek dan Bendahara Proyek Tahun Anggaran 2002

Kabupaten Klaten pengurus organisasi proyek tersebut adalah Drs. Bambang Purwanto, MM (terdakwa) sebagai penanggungjawab proyek Ir. Sutomo (Pensiun) sebagai wakil penanggungjawab proyek, Saksi Sri Pujiastuti, SH, sebagai pemimpin proyek, Saksi Titik Purwanti, sebagai bendaharawan proyek. Dalam pelaksanaan proyek tersebut ternyata Kantor Disnakertrans menemui kesulitan terhadap perintisan pembangunan gedung BLK, karena yang berwenang membangun gedung adalah Dinas Teknis dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Selanjutnya Saksi Sri Pujiastuti, SH sebagai pemimpin proyek melaporkan hal tersebut kepada terdakwa sebagai penanggungjawab proyek. Beberapa minggu kemudian Saksi Sri Pujiastuti, SH dipanggil oleh terdakwa dan diberitahu bahwa proyek perintisan pembangunan gedung balai latihan kerja (BLK) dirubah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 1160/2002 tanggal 28 September 2002 Penjabaran Proyek Perubahan APBD Kabupaten Klaten TA 2002, menjadi Proyek Perintisan BLK dengan Pelaksanaan:

a. Studi Kelayakan	Rp. 49.000.000,-
b. Alat Jahit Industri	Rp. 17.000.000,-
c. Perjalanan Dinas	Rp. 900.000,-
d. Honor	Rp. 1.300.000,-
e. ATK	Rp. 1.800.000,-
Jumlah	Rp. 70.000.000,-

Untuk pelaksanaan studi kelayakan dengan nilai proyek sejumlah Rp.49.000.000,- tersebut, maka sesuai dengan peraturan yang berlaku harus dilakukan dengan penunjukan langsung, namun terdakwa yang berkedudukan sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten dan penanggungjawab proyek yang mempunyai tugas antara lain membina, mengarahkan dan mengawasi pemimpin proyek dan petugas pelaksana lainnya, justru mengambil alih tugas-tugas dari Saksi Sri Pujiastuti, SH tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai pemimpin

proyek. Terdakwa tanpa melalui prosedur penunjukan langsung yaitu tidak melakukan pembukaan penawaran teknis dan penawaran harga sekaligus, tidak melakukan penilaian kualitas penawaran teknis, lalu terdakwa menunjuk Yayasan Yauma untuk melaksanakan proyek studi kelayakan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 1 November 2002 ditandatangani surat perintah kerja proyek perintisan BLK antara pemimpin proyek saksi Sri Pujiastuti, SH dan Yayasan Yauma yang diwakili oleh saksi Ir. Suko Risuciantoro serta diketahui oleh terdakwa sebagai penanggungjawab proyek.

Di dalam pelaksanaan proyek studi kelayakan BLK tersebut, lokasi studi kelayakan BLK seperti yang terdapat dalam penjabaran APBD telah ditentukan di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, namun terdakwa telah merubah lokasi studi kelayakan BLK seperti yang terdapat di dalam penjabaran APBD telah ditentukan di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Gayampurit, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Cawas, Desa Krakitan. Hal ini bukan lagi studi kelayakan seperti yang dimaksud dalam APBD, tetapi sudah berubah menjadi studi perbandingan, dan mengakibatkan daerah atau tempat yang akan didirikan BLK menjadi tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dalam penjabaran APBD. Selain itu, berdasarkan surat perintah kerja antara Yayasan Yauma dengan Disnakertrans, bahwa proyek studi kelayakan tersebut harus sudah selesai seluruhnya paling lambat tanggal 31 Desember 2001, namun proyek tersebut tidak disertai dengan perjanjian tambahan (*adendum*). Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klaten menderita kerugian sebesar Rp. 49.000.000,- atau sekitar jumlah itu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Drs. BAMBANG PURWANTO,MM sebagaimana dalam dakwaan Primair di atas menggunakan kewenangannya atau jabatannya untuk melakukan penunjukkan langsung terhadap Yayasan Yauma.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

3. Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klaten

Pengadilan Negeri Klaten dalam putusannya Nomor : 187/Pid.B/2003/PN Klt tanggal 11 Mei 2004, menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa Drs. Bambang Purwanto, MM tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diidakwakan dalam Dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar.
2. Membebaskan terdakwa Drs. Bambang Purwanto, MM tersebut dari semua dakwaan Penuntut Umum.
3. Menyatakan memulihkan hak terdakwa Drs. Bambang Purwanto, MM tersebut dalam kemampuan dan kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Foto copy surat-surat :

a. Termin II :

1. BA Pemeriksaan Barang Nomor. 556/1503/16 tanggal 13 Desember 2002.
2. BA Penerimaan Barang Nomor. 028/1475/16 A tanggal 14 Desember 2002

3. Daftar lampiran BA tanggal 14 Desember 2002

b. Termin III :

1. Lampiran IV A Daftar Pengantar SPP tanggal 28 Desember 2002.
2. Lampiran IV B Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin.
3. Lampiran IV D Daftar Rincian Penggunaan UUDP.
4. Surat Yauma Nomor : 15/YFI/XII/02 tanggal 28 Desember 2002 tentang Permohonan Termin.
5. BA Kemajuan Proyek Nomor 028/1504A/16 tanggal 26 Desember 2002.
6. Pemeriksaan Barang Nomor 566/1507/16 tanggal 27 Desember 2002.
7. BA Penerimaan Barang Nomor: 028/1504A/16 tanggal 28 Desember 2002.
8. Kwitansi.
9. Daftar Perincian Pengeluaran Termin III.

c. Surat-surat :

1. Keputusan Bupati Klaten No. 413 tahun 2002, tanggal 1 April 2002, tentang Penunjukan Penanggung Jawab Proyek, Wakil Penanggung Jawab Pimpro, dan Bendahara Proyek Tahun Anggaran 2002;
2. Keputusan Bupati Klaten No. 915/420/tahun 2002, tanggal 1 April 2002 tentang Pengesahan DIP yang dibiayai dari APBD Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2002 Disnakerduktrans;
3. Lampiran III Keputusan Bupati Klaten No. 1160/2002, tanggal 28 September 2002 tentang Penjabaran Proyek Perubahan

Anggaran Belanja Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2002;

4. Lampiran III Keputusan Bupati Klaten No. 903/331/2002, tanggal 28 Maret 2002 tentang Penjabaran Proyek Anggaran Belanja Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2002;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara, sedangkan asli surat-surat antara lain :

a. Termin I:

1. SPM (Lagger) Nomor : 1467/ DDL Tanggal 13 Desember 2002;
2. Tanda bukti pengeluaran (A2), termin I Rp. 14. 700.000,- (Empatbelasjuta Tujuhratusribu Rupiah);
3. Lampiran IV/A Daftar Pengantar SPP Nomor. 933/1433/16 tanggal 25 Nopember 2002;
4. Lampiran IV/B SPP;
5. Lampiran IV/D Daftar Perincian Rincian Penggunaan UUDP;
6. Permohonan termin I dari Yauma Nomor 11/YFI/02 tanggal 13 Nopember 2002;
7. Daftar Rincian Penggunaan Termin I;
8. BA Penyerahan Laporan Pendahuluan Nomor 01/BA-BLK/1102 tanggal 20 Nopember 2002;
9. Kwitansi;
10. BA Kemajuan Proyek Nomor 934/145/16 tanggal 21 Nopember 2002;
11. BA Pemeriksaan Barang Nomor. 028/1452/16 tanggal 22 Nopember 2002;

12. BA Penerimaan Barang Nomor. 028/1452/16 tanggal 23 Nopember 2002;

b. Termin II :

1. SPMU (Lagger) Nomor : 1626/DDD tanggal 21 Desember 2002;
2. Lampiran IV/A Daftar Pengantar SPP Nomor. 007/1505/16 tanggal 15 Desember 2002;
3. Lampiran IV/B SPP;
4. Lampiran IV/D Daftar Rincian Penggunaan UUDP
5. Tanda Bukti Pengeluaran (A2) sebesar Rp. 14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
6. Surat Yauma Nomor.09/YFI/XII/12 tanggal 12 Desember 2002 tentang Permohonan Termin II;
7. Kwitansi;
8. BA Penyerahan Laporan Kemajuan Kedua Nomor 02/BA-BLK/1202 tanggal 10 Desember 2002;
9. BA Kemajuan Proyek Nomor 028/1471 A/16 tanggal 12 Desember 2002;
10. Daftar Perincian Pengeluaran Termin II;

c. Termin III:

1. SPMU (Lagger) Nomor 160/DDD/tanggal 30 Desember 2002;
2. Tanda Bukti Pengeluaran (A2) sebesar Rp. 19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);
3. Penyerahan Laporan Pelaksanaan Proyek Nomor 03/BA-BLK/1202 tanggal 23 Desember 2002;

d. Surat-surat :

1. Surat Kadisnakertrans Kabupaten Klaten No. 503/173/16, tanggal 18 Pebruari 2003, tentang Laporan Hasil *Study* Kelayakan ;
2. Surat Perjanjian Kerja Sama No. 560/135 1B/16, tanggal 4 Nopember 2002 tentang Pekerjaan *Study* Kelayakan Perintisan BLK;
3. Surat Perintah Kerja No. 094/135 1C/16, tanggal 4 Nopember 2002;
4. Surat Keputusan Pimpro No. 050/1351 A/16, tanggal 4 Nopember 2002 tentang Penunjukan YAUMA sebagai Pelaksana Pekerjaan *Study* Kelayakan Perintisan BLK;
5. Surat Bupati Klaten No. 600/614/04, tanggal 1 Nopember 2002 tentang Persetujuan Pelaksanaan Proyek Secara Penunjukan Langsung;
6. Surat Kedisnakertrans Kabupaten Klaten No. 566/1318/16, tanggal 15 Oktober 2002, tentang Ijin Penunjukan Langsung;
7. Surat Keputusan Pimpro No. 050/1333 A/ 16, tanggal 2 Nopember 2003, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Panitia Pemeriksa Barang Proyek BLK;
8. Surat tentang PSP, LK, DIPDA/PO, Proyek Perintisan BLK;
9. Berita Acara Penyerahan Proyek Pembangunan Tahun Anggaran 2003 No. 050/138/16 tanggal 30 Januari 2003;

Dikembalikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten dan Uang Rp. 49.000.000 dikembalikan kepada Drs. Bambang Purwanto, MM;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Berdasarkan amar putusan tersebut, terlihatlah bahwa putusan tersebut merupakan putusan yang membebaskan terdakwa. Oleh karena itu, Demi memperoleh rasa keadilan, Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan kasasi tanpa banding. Hal ini karena menurut Jaksa penuntut Umum bahwa putusan bebas itu bukanlah putusan bebas murni, melainkan putusan bebas tidak murni.

Putusan bebas tidak murni mempunyai kualifikasi, sebagai berikut :

- 3) Pembebasan didasarkan atas suatu penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan.
- 4) Dalam menjatuhkan putusan pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, baik absolut maupun relatif dan sebagainya (Oemar Seno Adjie, 1985:164).

4. Memori Kasasi

- a. Isi Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus Korupsi Yang Dilakukan oleh Terdakwa Drs. Bambang Purwanto, MM.
 - 1). Bahwa mengacu kepada dakwaan Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka tindak pidana korupsi dari perbuatan terdakwa dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa, yang telah melakukan proses penunjukan langsung yang tidak sesuai dengan prosedur dalam Keppres 18 /2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Instansi Pemerintah dan merubah lokasi proyek *study* kelayakan seperti yang disebut dalam penjabaran APBD, serta proyek *study* kelayakan yang seharusnya selesai paling lambat tanggal 31 Desember 2002, namun baru selesai tanggal 18 Pebruari 2003 dan keterlambatan tersebut tanpa disertai dengan perjanjian tambahan (*adedum*), selain hal tersebut

terdakwa juga mengembalikan kerugian uang negara sebesar Rp. 49.000.000,- dan setelah proyek itu selesai terdakwa telah menerima uang dari Yayasan Yauma sejumlah Rp.2.000.000,- Sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan Primair **seharusnya terbukti**, namun majelis hakim menganggap tidak terbukti.

Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti dalam dakwaan primair karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang tidak patut, yaitu

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi Sri Pujiastuti, SH, Saksi Ir. Suko Risucianto dan Saksi Ir. Ryo Darmanto yang saling berkaitan, bahwa terdakwa selaku penanggung jawab proyek perintisan *study* kelayakan BLK telah melakukan pelaksanaan proyek perintisan BLK yang hasilnya tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor: 24 Tahun 2002 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah yang menyebutkan proyek perintisan BLK dengan dana sebesar Rp. 49.000.000,- dipergunakan untuk *study* kelayakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan pelatihan kerja. Sasaran terbangunnya BLK tersebut menjadi 3 lokasi, yaitu Desa Gayampri, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Cawas, dan dan Desa Krakitan. Hal ini bukan lagi *study* kelayakan seperti yang dimaksud dalam APBD, tetapi sudah berubah menjadi studi perbandingan, dan mengakibatkan daerah atau tempat yang akan didirikan BLK Menjadi tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dalam penjabaran APBD.

Bahwa dalam pelaksanaan proyek *study* kelayakan BLK di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten yang

dibiayai dengan APBD tahun anggaran 2002, terdakwa telah memanggil Yayasan Yauma yang diwakili oleh saksi Ir. Suko Risucianto untuk datang di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten, lalu terdakwa menunjuk secara langsung kepada Yayasan Yauma untuk melaksanakan proyek studi kelayakan tanpa melalui prosedur sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah. Dalam penunjukan langsung tersebut tidak benar, namun terdakwa tidak menanggapinya.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja antara Yauma dengan Disnakertrans Kab., Klaten, bahwa proyek studi kelayakan tersebut harus sudah selesai seluruhnya paling lambat tanggal 31 Desember 2002, namun proyek tersebut baru selesai pada tanggal 18 Pebruari tahun 2003 dan keterlambatan proyek tersebut tidak disertai perjanjian tambahan (*adedium*).

Oleh karena prosedur yang tidak benar tersebut maka terdakwa telah menguntungkan orang lain dalam hal ini Yayasan Yauma. Demikian pula juga telah diuntungkan dalam pelaksanaan proyek *study* kelayakan BLK ini, karena setelah proyek *study* kelayakan itu selesai, terdakwa sendiri menerangkan mendapat uang sebesar Rp. 2.000.000,- dari Yayasan Yuama. Hal ini merupakan perbuatan **melawan hukum**.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klaten menderita kerugian sebesar Rp.49.000.000,- atau sekitar jumlah itu. Sehingga perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah

dengan UU No. 20 Tahun 2001 telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga sudah selayaknya terdakwa harus dihukum.

- 2) Terhadap dakwaan subsidiar terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka tindak pidana korupsi dari perbuatan terdakwa dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa, yang telah mengambil wewenang pimpinan proyek dalam proses penunjukan langsung yang tidak sesuai dengan prosedur dalam Keppres 18/2000, dan merubah lokasi proyek *study* kelayakan seperti yang dijabarkan dalam APBD, serta proyek *study* yang terlambat dalam penyelesaiannya tanpa disertai perjanjian tambahan (*adendum*). Terdakwa mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 49.000.000,- dan setelah proyek itu terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- seharusnya perbuatan terdakwa terbukti, tetapi majelis hakim menyatakan tidak terbukti.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi Sri Pujiastuti, SH, saksi Ir. Suko Risucianto dan saksi Ir. Ryo Darmanto yang saling berkaitan, bahwa terdakwa selaku penanggung jawab proyek perintis studi kelayakan BLK telah melakukan pelaksanaan proyek perintisan BLK yang hasilnya tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 24b Tahun 2002 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah yang menyebutkan proyek perintisan BLK dengan dana sebesar Rp. 49.000.000,- dipergunakan untuk studi kelayakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan pelatihan kerja. Sasaran terbangunnya gedung BLK serta prasarana pendukung, lokasi Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kab Klaten. Namun terdakwa telah

merubah lokasi studi kelayakan tersebut menjadi 3 lokasi yaitu Desa Gayampurit, Sangar Kegiatan Belajar (SKB) Cawas, dan Desa Krakitan. Sehingga hal ini bukan lagi studi kelayakan seperti yang dimaksud dalam APBD, tetap sudah berupa menjadi studi perbandingan, dan mengakibatkan daerah atau tempat yang akan didirikan BLK menjadi tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dalam penjabaran APBD.

Bahwa dalam pelaksanaan proyek studi kelayakan BLK di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten yang dibiayai dengan APBD Tahun Anggaran 2002, terdakwa telah memanggil Yayasan Yauma yang diwakili oleh saksi Ir Suko Risucianto untuk datang dikantor Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten, lalu terdakwa menunjuk secara langsung kepada Yayasan Yauma untuk melaksanakan proyek studi kelayakan tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Instansi Pemerintah. Dalam penunjukan kepada Yauma tersebut disaksikan oleh saksi Sri Pujiastuti, SH sudah mengingatkan kepada terdakwa, tentang proses penunjukan langsung tersebut tidak benar, tetapi terdakwa tidak menanggapi.

Bahwa berdasarkan surat perintah kerja antara Yauma dengan Disnakertrans Kab Klaten, bahwa proyek studi kelayakan tersebut harus sudah selesai seluruhnya paling lambat tanggal 31 Desember 2002, tetapi proyek tersebut baru selesai pada tanggal 18 Pebruari thun 2003 dan keterlambatan proyek tersebut tidak disertai dengan perjanjian tambahan (*adendum*).

Berdasarkan prosedur yang tidak benar tersebut maka terdakwa telah menguntungkan orang lain dalam hal ini adalah

Yayasan Yauma. Demikian juga terdakwa telah diuntungkan dalam pelaksanaan proyek *study* kelayakan BLK ini, karena setelah proyek *study* kelayakan ini selesai, terdakwa sendiri menerangkan mendapat uang sebesar Rp. 2.000.000,- dari Yayasan Yauma. Hal ini merupakan perbuatan melawan hukum.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klaten menderita kerugian sebesar Rp. 49.000.000,- atau sekitar jumlah itu. Sehingga perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga sudah selayaknya terdakwa harus dihukum.

Oleh karena itu tidak benar telah menguntungkan orang lain, dalam hal ini Yayasan YAUMA. Demikian pula proyek itu menguntungkan terdakwa, karena setelah proyek selesai terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 2.000.000,-. Hal ini merupakan perbuatan melawan hukum

Akibat dari hal tersebut Pemerintah Kabupaten Klaten menderita kerugian sebesar Rp. 49.000.000,- atau sekitar jumlah itu. Sehingga perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan subsidiair Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga sudah selayaknya terdakwa harus dihukum.

5. Pembahasan

a. Membuktikan sebagai Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Atau Bebas Tidak Murni

Berdasarkan amar putusan tersebut, terlihatlah bahwa putusan tersebut merupakan putusan yang membebaskan terdakwa. Oleh karena itu, demi memperoleh rasa keadilan, Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan kasasi tanpa banding. Hal ini karena menurut Jaksa Penuntut Umum bahwa putusan bebas itu bukanlah putusan bebas murni, melainkan putusan bebas tidak murni. Sehingga putusan bebas itu seharusnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini terbukti dari adanya bantahan atau keberatan dalam memori kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terhadap putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten. Sebagaimana Mahkamah Agung tahun 1974 menggariskan Yurisprudensi mengenai yang dimintakan kasasi dengan menyatakan antara lain, bahwa permohonan kasasi terhadap putusan pembebasan dari segala tuduhan tidak dapat diterima, karena dalam memori kasasi tidak memuat bantahan, bahwa pembebasan tersebut sesungguhnya suatu pelepasan dari segala tuntutan hukum berdasarkan alasan bahwa pembebasan adalah tidak murni, juga tidak terdapat keberatan-keberatan bahwa pembebasan termaksud didasarkan atas tafsiran yang kurang benar atau kurang tepat (Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Juli 1974 No. 69K/ Kr/1973). Diantara bantahan atau keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1). Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Klaten yang membebaskan terdakwa Drs. Bambang Purwanto, MM dari segala tuntutan hukum atau dalam hal ini bebas murni, tidaklah tepat karena seharusnya putusan pengadilan Negeri Klaten merupakan pembebasan yang tidak murni atau dapat disamakan dengan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*) karena perbuatan

terdakwa sudah ada dan dapat dibuktikan, tetapi bukan merupakan tindak pidana korupsi tetapi masuk ke dalam Hukum Administrasi Pengelolaan Keuangan atau setidaknya masuk ke dalam Hukum Perdata. Hal ini karena dalam persidangan Hakim Pengadilan Negeri Klaten tidak mengupas alat bukti secara mendalam di dalam Dakwaan Primair yang didakwakan kepada terdakwa Drs. Bambang Purwanto, MM berdasarkan fakta yang lengkap, tetapi hanya mengupas fakta-fakta yang sifatnya meringankan terdakwa.

2). Dalam Dakwaan Primair, yaitu perbuatan terdakwa dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa, yang telah melakukan proses penunjukan langsung yang tidak sesuai dengan prosedur dalam Keppres 18 /2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Instansi Pemerintah dan merubah lokasi proyek *study* kelayakan seperti yang disebut dalam penjabaran APBD, serta proyek *study* kelayakan yang seharusnya selesai paling lambat tanggal 31 Desember 2002, namun baru selesai tanggal 18 Pebruari 2003 dan keterlambatan tersebut tanpa disertai dengan perjanjian tambahan (*adedum*), selain hal tersebut terdakwa juga mengembalikan kerugian uang negara sebesar Rp. 49.000.000,- dan setelah proyek itu selesai terdakwa telah menerima uang dari Yayasan Yauma sejumlah Rp.2.000.000,- Sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan Primair **seharusnya terbukti, namun majelis hakim menganggap tidak terbukti.**

3). Dalam Dakwaan Subsidiar, yaitu tindak pidana korupsi dari perbuatan terdakwa dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa, yang telah mengambil wewenang pimpinan proyek dalam proses penunjukan

langsung yang tidak sesuai dengan prosedur dalam Keppres 18/2000, dan merubah lokasi proyek *study* kelayakan seperti yang dijabarkan dalam APBD, serta proyek *study* yang terlambat dalam penyelesaiannya tanpa disertai perjanjian tambahan (*adendum*). Terdakwa mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 49.000.000,- dan setelah proyek itu terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2000.000,- Sehingga **seharusnya perbuatan terdakwa terbukti, tetapi majelis hakim menyatakan tidak terbukti.**

Berdasarkan hal tersebut di atas patutlah putusan hakim yang membebaskan terdakwa dianggap sebagai putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau bebas tidak murni dan berhak untuk diajukan kasasi tanpa banding.

Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Klaten dalam kasasi terhadap putusan bebas tidak murni atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah merupakan bagian dari tugas kejaksaan sebagai wakil negara untuk memenuhi kepentingan umum(masyarakat).

b. Alasan Atau Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Sesuai dengan Pasal 253 ayat 1 KUHAP, bahwa pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak, dalam hal ini jaksa penuntut umum, guna menentukan :

1. Apakah suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagai mestinya.
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang .

3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Sehingga dalam memori kasasi Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan ketiga hal tersebut.

- 1) Apakah suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagai mestinya

Peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

- a). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim Majelis Pengadilan Negeri Klaten telah salah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya :

(1).Bahwa sebagaimana dimaklumi terhadap terdakwa Drs.Bambang Purwanto, MM jaksa penuntut umum mengajukan ke Pengadilan untuk diadili dengan dakwaan Primair Pasal 2 (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang unsurnya sebagai berikut :

(a). Setiap orang

(b). Secara Melawan Hukum

Menurut Andi Hamzah dalam delik korupsi, terutama Pasal 2 UUPTK 1999, pengertian melawan hukum paling tepat dipakai sebagai tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan korupsi tersebut.

Dalam hal ini terdakwa Drs.Bambang Purwanto,MM telah menikmati hasilnya yaitu uang senilai Rp. 2.000.000,00 dari Yayasan YAUMA.

- (c).Telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klaten. Berdasarkan kasus ini Pemerintah Klaten telah mengalami kerugian sebesar Rp. 49.000.000,00.
- (d). Bahwa dalam teknis pembuktian terhadap dakwaan disusun terlebih dahulu unsur-unsur pasal atau unsur delik dalam pasal tersebut.
- (e).Bahwa dalam penafsiran terhadap unsur unsur-unsur pasal-pasal tersebut tentunya tetap mengacu kepada ilmu atau teori termasuk penjelasan dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimaksud.
- (f). Bahwa UU No.31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan undang-undang baru, dalam penerapan unsur pasalnya telah ditegaskan dalam uraian penjelasan Undang-undang itu sendiri
- (g).Bahwa sebagai contoh dalam penerapan pasal dari dakwaan yang diajukan yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor:20 tahun 2001 yang salah satu unsurnya adalah melawan hukum secara tegas dalam penjelasan undang-undangnya telah ditentukan batasannya yaitu yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut telah diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut

dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbul akibat.

(h). Bahwa ternyata majelis hakim dalam menerapkan unsur melawan hukum dalam pertimbangan hukumnya nyata-nyata tidak membahas unsur melawan hukum.

(i). Bahwa majelis hakim telah lalai, dalam perkara terdakwa Drs. Bambang Purwanto, MM ini yang dipermasalahkan adalah keuangan negara Pemda Kabupaten Klaten yang tentunya dalam penggunaannya tidak hanya mengacu kepada SK Bupati, melainkan harus mengacu peraturan perundang-undang yang lain antara lain Keppres 18 tahun 2000. Prosedur penunjukan langsung dalam Keppres 18 tahun 2000 sesuai dengan Pasal 17 ayat (4), yaitu penunjukan langsung adalah pengadaan jasa konsultasi yang penyedia jasanya ditentukan oleh kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk/dan diterapkan untuk :

(i). Pengadaan jasa konsultasi dengan nilai sampai Rp. 50.000.000,-(Lima puluh Juta Rupiah);

(ii).Pengadaan jasa konsultasi yang setelah dilakukan pelelangan ulang hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat;

(iii).Pengadaan yang bersifat mendesak atau khusus setelah mendapat persetujuan dari menteri / kepala lembaga pemerintah non departemen/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Direktur BUMN/BUMD;

(iv).Penyedia jasa tunggal.

(2).(a). Bahwa terdakwa sebagaimana dimaklumi terhadap terdakwa Drs. Bambang Purwanto, MM JPU mengajukan ke Pengadilan untuk diadili dengan dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 yang unsurnya adalah sebagai berikut :

(i). Setiap orang

(ii).Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya

(iii).Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

(iv). Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

(v). Bahwa dalam teknis pembuktian terhadap dakwaan disusun terlebih dahulu unsur-unsur pasal atau unsur delik dalam pasal tersebut.

- (vi). Bahwa dalam penafsiran terhadap unsur-unsur pasal-pasal tersebut tentunya tetap mengacu kepada ilmu atau teori hukum termasuk penjelasan dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimaksud.
- (vii). Bahwa UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan undang-undang baru, dalam penerapan unsur pasalnya telah ditegaskan dalam uraian penjelasan Undang-Undang itu sendiri.
- (viii). Bahwa sebagai contoh dalam penerapan pasal dari dakwaan yang kami ajukan yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Yang salah satu unsurnya adalah menyalahgunakan kewenangan, yang di dalam unsur menyalahgunakan kewenangan tersebut terdapat juga unsur melawan hukum, secara tegas dalam penjelasan undang-undangnya telah ditentukan batasannya yaitu yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut telah diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam

masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil menunjukan.

- (ix). Bahwa ternyata majelis hakim dalam menerapkan unsur melawan hukum dalam pertimbangan hukumnya nyata-nyata tidak membahas unsur melawan hukum.
 - (x). Bahwa majelis hakim telah lalai, dalam perkara terdakwa Drs. Bambang Purwanto, MM ini yang dipermasalahkan adalah keuangan negara Pemda Kabupaten Klaten yang tentunya dalam penggunaanya tidak hanya mengacu kepada SK Bupati, melainkan harus mengacu peraturan perundang-undang yang lain antara lain Keppres 18 Tahun 2000.
- (b). Bahwa dalam dakwaan subsidiair yang unsurnya “menyalahgunakan kewenangan dalam pertimbangan hukum majelis hakim dalam rangka membuktikan unsur hanya berpatokan pada SK Bupati, dan telah diterimanya proyek *study* perintisan BLK oleh rapat paripurna DPRD Klaten, melainkan harus mengacu peraturan perundang-undangan misalnya Keppres 18 Tahun 2000.
- (c). Untuk menentukan menyalahgunakan atau tidak, tidak hanya dengan SK Bupati tetapi juga ukurannya berdasarkan Pasal 52 KUHP yang intinya terdakwa melakukan perbuatan pidananya menggunakan kekuasaannya

Bahwa dalam kasus posisi tersebut terdakwa tidak dapat menunjuk yayasan YAUMA jika terdakwa tidak menduduki jabatan sebagai kepala disnakertrans.

Berdasarkan uraian di atas perbuatan terdakwa telah terbukti.

Bahwa demikian pula dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, dalam unsur pasal ini sebetulnya ada 2 bagian yang harus dipisahkan, yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain, jadi tidak harus dirinya sendiri untung (terdakwa) tetapi dengan diuntungkannya orang lain saja sudah cukup.

Permasalahannya adalah apakah keuntungan orang lain itu telah sesuai dengan norma hukum, rasa keadilan kepatutan, dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam penjelasan undang-undang Tindak Pidana Korupsi, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Penunjukan secara langsung kepada Yayasan Yauma yang tanpa prosedur tersebut, telah menguntungkan Yayasan Yauma, hal ini terbukti dengan pengakuan terdakwa bahwa setelah selesai pelaksanaan proyek *study* kelayakan perintisan BLK terdakwa telah menerima uang sebesar

Rp.2.000.000,00 dari Yayasan Yauma. Dengan demikian, Yayasan Yauma telah diuntungkan dengan ditunjuknya sebagai pelaksana proyek perintisan BLK tersebut, dan terdakwa pun juga telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah).

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas menguntungkan diri sendiri atau orang lain terbukti.

Pasal 191 ayat(1) KUHAP yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Berdasarkan ketentuan tersebut majelis hakim tidak mengerti pengertian bebas, dalam perkara ini sesuai dengan pertimbangan hakim ada perbuatannya, namun hakim menilai bukan perbuatan jika putusannya bukan bebas.

- 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang

Pasal 197 KUHAP ayat (1) KUHAP huruf d dalam surat putusan pembedaan memuat:

- a) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan

- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera

Bahwa di persidangan telah terungkap fakta adanya penerimaan uang Rp. 2.000.000,- oleh terdakwa dari Yayasan Yauma, yang sebenarnya merupakan fakta hukum, tetapi kenyataannya dalam putusan hakim hal ini sama sekali tidak disinggung dan dipertimbangkan padahal itu termasuk fakta hukum yang menentukan terdakwa salah atau tidak.

Dengan demikian mengacu pada Pasal 197 ayat 2, maka putusan ini batal demi hukum.

- 3). Dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya

Ketidaktepatan menerapkan sanksi dapat merupakan hal yang melampaui wewenang, misalnya didalam hal, mengurangi atau menambah sanksi yang telah ditentukan undang-undang (Leden Marpaung, 2000:45).

Merujuk pada hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Klaten tidak menerapkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang seharusnya terdakwa diputuskan dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah). Dalam hal ini terdakwa justru dibebaskan. Dengan demikian, pengadilan dalam menjatuhkan putusan telah terbukti melampaui wewenangnya.

c. Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Kasasi Terhadap Perkara yang Diputus Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Ditinjau dalam Kasus Korupsi di Kejaksaan Negeri Klaten

Berdasarkan hal tersebut di atas (poin a dan poin b) dalam hal menentukan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasi kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Klaten sebagai berikut:

- 1). Membuktikan bahwa putusan bebas dari majelis hakim Pengadilan Negeri Klaten adalah merupakan putusan bebas tidak murni, atau merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*). Maka menjadi dasar pertimbangan bagi jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Klaten dalam mengajukan kasasi terhadap putusan bebas tidak murni atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena hal ini merupakan bagian dari tugas kejaksaan sebagai wakil negara untuk memenuhi kepentingan umum(masyarakat).
- 2). Menentukan alasan atau pertimbangan jaksa penuntut umum dalam permohonan kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Pertimbangan atau alasan pengajuan kasasi sesuai dengan Pasal 253 ayat 1, yaitu
 - a). Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b). Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
 - c). Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dan pembahasan yang telah dilakukan. Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar hukum kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum
 - a. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.14-PW.07.03.Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 (Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP) butir 19.
 - b. Yurisprudensi tentang kasasi terhadap putusan bebas
 - c. Hasil Rumusan Penataran Terpadu Aparat Penegak Hukum tanggal ,11-16 April 1988 di Pusdiklat Departemen Kehakiman RI Sebagaimana disempurnakan dalam rapat MAHKEJAPOL tanggal 10 Pebruari 1992 dan pada tanggal 4 Maret 1992, dalam bagian Penyidangan, Putusan Pengadilan dan Upaya Hukum, *point* ke-43 yaitu tentang upaya hukum terhadap putusan yang sebagian membebaskan atau melepaskan dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan dasar hukum di atas dapat diketahui bahwa terhadap putusan bebas, yang berupa putusan bebas tidak murni atau lepas dari segala tuntutan hukum, dapat diajukan permohonan kasasi, tanpa melalui proses banding terlebih dahulu.

Pengajuan kasasi tanpa banding tidak diatur secara jelas dalam KUHAP. Hal ini timbul dengan adanya dasar hukum lain yang sebagian besar berupa Yurisprudensi. Penggunaan Yurisprudensi ini untuk memenuhi rasa keadilan dan memenuhi kepentingan umum(masyarakat). Karena putusan hakim tidak selamanya memberikan rasa keadilan bagi

para pihak, dalam hal ini adalah jaksa penuntut umum. Sehingga berdasarkan inisiatif jaksa penuntut umum diajukanlah kasasi tanpa banding.

2. Dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam memori kasasi terhadap perkara yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum ditinjau dalam kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Klaten.

Untuk menentukan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasi kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Klaten sebagai berikut:

- a. Membuktikan bahwa putusan bebas dari majelis hakim Pengadilan Negeri Klaten adalah merupakan putusan bebas tidak murni, atau merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*). Terbukti dengan adanya bantahan terhadap putusan bebas yang di putus hakim Pengadilan Negeri Klaten. Hal tersebut menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Klaten dalam kasasi terhadap putusan bebas tidak murni atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena hal ini merupakan bagian dari tugas kejaksaan sebagai wakil negara untuk memenuhi kepentingan umum(masyarakat).
- b. Alasan Atau Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum
 - 1). Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Dalam kasus korupsi ini, Pengadilan Negeri Klaten tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Hal ini terbukti dengan kurang tepatnya majelis hakim dalam menafsirkan unsur melawan hukum pada dakwaan primair. Sedangkan pada dakwaan susidiar unsur menyalahgunakan kewenangan dalam pertimbangan hukum majelis hakim dalam rangka membuktikan unsur hanya berpatokan pada SK Bupati melainkan juga harus

mengacu pada peraturan perundang-undangan lain misalnya Keppres 18 Tahun 2000 dan Pasal 52 KUHAP.

- 2). Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang .

Bahwa dipersidangan telah terungkap fakta adanya penerimaan uang Rp.2.000.000,- oleh terdakwa dari Yayasan Yauma, yang sebenarnya merupakan fakta hukum, tetapi kenyataannya dalam putusan hakim hal ini sama sekali tidak disinggung dan dipertimbangkan padahal itu termasuk fakta hukum yang menentukan terdakwa salah atau tidak.

Dengan demikian mengacu pada Pasal 197 ayat 2, maka putusan ini batal demi hukum.

- 3). Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenanganya.

Pengadilan Negeri Klaten dalam menjatuhkan putusan telah terbukti melampaui wewenanganya, karena terdakwa telah diputus bebas.

B. SARAN

1. Terhadap putusan bebas yang diputuskan hakim, hendaklah Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil dari negara dalam penegakkan keadilan dan hukum, mampu mengkritisi karena bisa jadi putusan tersebut bukan merupakan putusan bebas murni.
2. Hakim pengadilan hendaklah jangan terlalu mudah dalam mengeluarkan putusan bebas terhadap tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi ini adalah tindak pidana yang merugikan negara.
3. Dasar pertimbangan dalam memori kasasi tidak harus disebutkan detail keterangan-keterangan dari saksi, karena keterangan saksi sudah ada dan nyata terlihat dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djoko Prakoso. 1986. *Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHAP*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Buku Pedoman Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Leden Marpaung. 2000. *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lexi J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Luhut MP Pangaribuan. 2003. *Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHP Dan Hukum Internasional Yang Relevan (edisi terbaru)*. Bandung: Djambatan.
- ML.HC..Hulsman. 1984. *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*.. Jakarta: CV Rajawali.
- Moch. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Mandar Maju.
- Oemar Seno Adji. 1985. *KUHAP Sekarang*. Jakarta: Erlangga.
- Rd. Achmad S. Soema Di Pradja. 1981. *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung :Alumni.
- Riduan Syahrani. 2004. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Serjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Rafindo Persada.

Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Daftar Peraturan

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keppres RI No. 86 Tahun 1999 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Keppres 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Instansi Pemerintah.

